

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sanitasi termasuk kajian penting karena merupakan salah satu aspek mendasar sebagai hak asasi manusia dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan. Pencapaian sanitasi di Negara kita yang belum tuntas menjadi tantangan besar pada era pasca *Millenium Development Goals (MGDs)* (Indriyani, 2016).

Permasalahan pembangunan sanitasi di Indonesia merupakan masalah tantangan sosial-budaya, salah satunya adalah perilaku penduduk yang biasa Buang Air Besar (BAB) disembarangan tempat, khususnya kebadan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Berdasarkan deklarasi Johannesburg yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals (MGDs)* menetapkan pada tahun 2015 sepakat untuk menurunkan separuh proporsi penduduk dunia yang tidak memiliki akses sanitasi dasar yaitu jamban sehat dan harus mendapatkan akses sanitasi dasar (jamban) pada tahun 2025. Penetapan ini telah disepakati oleh Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia (Marwanto, 2018).

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman

serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kala sanitasi seringkali dianggap tidak memiliki daya ungkit terhadap hasil sebuah pembangunan, sehingga seringkali pula sanitasi terpinggirkan dibandingkan urusan-urusan yang lain (Sutarjo, 2018).

Sanitasi merupakan salah satu permasalahan klasik yang tak kunjung tuntas di Indonesia. Target capaian sanitasi *Millenium Development Goals (MDGs)* yang berakhir tahun 2015 lalu, maupun dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang masih berlangsung hingga kini, belum dapat tercapai secara optimal (Suryani, 2020).

Untuk melakukan percepatan terhadap pencapaian target akses sanitasi yang layak, salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) No. 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kemudian diperbarui dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu *Enabling Environment, Demand Creation dan Supply Improvement*. Apabila salah satu dari komponen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tersebut tidak ada maka proses pencapaian 5 pilar tidak maksimal (Depkes RI, 2008).

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan sebuah metode dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dengan meningkatkan kepedulian masyarakat akan sanitasi melalui metode pemicuan. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari 5 (lima)

pilar yaitu menghentikan buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga yang tepat, pengelolaan limbah cair, pengelolaan sampah rumah tangga yang tepat. Kelima pilar inilah yang secara bertahap mulai dilaksanakan programnya diseluruh daerah di Indonesia. Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selama ini banyak dilakukan di daerah atau Desa. Melalui pendekatan ini masyarakat mau berubah bahkan membuat fasilitas sanitasinya dengan biayanya sendiri. Penyadaran untuk melakukan perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat juga sangat dibutuhkan dikawasan urban atau perkotaan (Pedoman STBM, 2011).

Kesejahteraan masyarakat Desa sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat Desa tersebut. Pengelolaan yang baik dan sistem yang baik merupakan sebuah faktor pendorong bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya sendiri. Kesehatan dan kebersihan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap Desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong program Desa melalui Pemerintah Desa dan Kabupaten menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016)

Melihat berbagai permasalahan yang ada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kolaborasi dengan samawarea tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebuah harapan yang dihadirkan oleh Pemerintah untuk dapat mensejahterakan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya

kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diimplementasikan di seluruh Desa dan Kecamatan di Sumbawa Barat. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu adanya program penempatan *septic tank* untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki *septic tank* untuk penampungan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga di masing-masing rumahnya, hanya bisa membuang sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga ke sembarang tempat, sehingga dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas udara maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan orang lain. Dalam mengelola limbah atau sampah rumah tangga, yang terjadi seperti mengurangi tempat-tempat pembuangan sampah, serta meningkatkan penegak hukum terhadap para pelanggarnya (Perpem No. 81, 2012).

Berikut data penerimaan bantuan *septic tank* dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2017-2019:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Bantuan *Septic Tank* Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019**

Penerimaan Bantuan <i>Septic Tank</i> di Kabupaten Sumbawa Barat	Tahun		
	2017	2018	2019
Jumlah rumah yang berhak menerima bantuan	5.000	6.000	8.000
Total jumlah penerima bantuan	19.000		

*Sumber : Samawarea.com 2019*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat peningkatan jumlah *septic tank* di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Kabupaten Sumbawa Barat kembali menerima bantuan 8.000 *septic tank* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), karena tahun lalu Kabupaten Sumbawa Barat sudah mendapatkan 11.000 *septic tank* dan tuntas 100%. Pemberian bantuan ini dikarenakan *septic tank* di tahun 2017-2018 berhasil dikerjakan tepat waktu. Berdasarkan jumlah keseluruhan data di Kabupaten Sumbawa Barat hanya 19.000 yang berhak menerima bantuan. Menurut

Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Sumbawa Barat yang dikutip dari Samawarea.com total anggaran hibah tahun 2019 mencapai Rp. 2 Miliar, sementara itu untuk biaya operasionalnya sebanyak Rp. 1 Miliar sedangkan untuk penerimaan manfaat sudah tersebar di semua peluk Kabupaten Sumbawa Barat, selain itu untuk menuntaskan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 100 hari kerja terus digencarkan, koordinasi dan kolaborasi mulai dari Pemerintah Desa hingga Kabupaten semakin dikuatkan (Samawarea.com 2019).

Berkaitan dengan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini, dari 57 Desa yang ada di Sumbawa Barat sudah semua Desa melaksanakan program ini mulai dari Desa pelosok sampai dengan Desa yang dekat dengan kota. Misalnya Desa Mujahiddin yang merupakan Desa di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 9 RT. Di Desa Mujahiddin ini Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah dikatakan berjalan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dikatakan sempurna dikarenakan belum semua rumah mendapatkan *septic tank*, dari 300 rumah yang ada di Desa Mujahiddin baru 68 rumah yang mendapatkannya, sehingga sering terjadi ketimpangan antarmasyarakat seperti belum terjalin hubungan Pemerintah Desa dengan masyarakat sehingga dalam kenyataannya kondisi pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga masih kurang efektif (InfoPublik.id, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan Judul **“Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam Pelaksanaan 5 Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muhajiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam Pelaksanaan 5 Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muhajiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 ?
2. Apa saja kendala Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam Pelaksanaan 5 Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muhajiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam Pelaksanaan 5 Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muhajiddin Kecamatan Brang Ene

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.

2. Untuk mengetahui kendala dalam Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam Pelaksanaan 5 Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muhajiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

1. Manfaat Akademik

Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

3. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian Sanitasi Total Berbasis



Masyarakat (STBM).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan/perkembangan Daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Ruang Lingkup Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**

##### **1. Konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**

Menurut Kemenkes RI (2012) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan.

- a. Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mencapai kondisi sanitasi total mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3

komponen yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sanitasi dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah.

#### 1) Penciptaan Lingkungan yang Kondusif

Komponen ini mencakup advokasi kepada para pemimpin Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam membangun komitmen bersama untuk melembagakan kegiatan pendekatan STBM yang di harapkan akan menghasilkan :

- a) Komitmen Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya untuk melaksanakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyediakan anggaran untuk penguatan intitusi
- b) Kebijakan dan peraturan Daerah mengenai program sanitasi seperti SK Bupati, Perda, RPJMP, Renstra, dll.
- c) Terbentuknya lembaga organisasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi, menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi Daerah, koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non pemerintah
- d) Adanya tenaga fasilitator, pelatih Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan kegiatan peningkatan kapasitas
- e) Adanya pemantauan hasil kinerja dan proses pengelolaan pembelajaran.

#### 2) Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi

Komponen peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku yang higienis dan

saniter, berupa :

- a) Pemicuan perubahan perilaku
- b) Promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan sanitasi secara langsung
- c) Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku
- d) Memfasilitasi terbentuknya komite/tim kerja masyarakat
- e) Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat melalui mekanisme kompetisi dan benchmark kinerja daerah.

### 3) Peningkatan Penyediaan Sanitasi

Peningkatan penyediaan sanitasi yang secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka pasar sanitasi perdesaan yaitu :

- a) Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau
- b) Menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan
- c) Mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk wirausahaan sanitasi lokal
- d) Mempromosikan pelaku usaha sanitasi dalam rangka memberikan akses pelaku usaha sanitasi lokal ke potensi pasar sanitasi on site.

Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci

tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat (Kasjono, 2017).

## **B. Ruang Lingkup Kolaborasi**

### **1. Definisi Kolaborasi**

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan (Dominggus, 2020).

Kolaborasi yaitu tindakan yang di ambil untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan semua pihak. Sementara itu kolaborasi juga merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana terdapat aktivitas tertentu yang di tunjukkan untuk mencapai tujuan bersama

dengan saling membantu dan memahami satu sama lain (Irianti, 2021).

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja dan organisasi (Withford, 2010).

Adapun karakteristik dan tujuan dari kolaborasi menurut Carpenter adalah (Irianti, 2021) :

- 1) Partisipasi tanpa batas dan tidak hirarki
- 2) Partisipan bertanggung jawab
- 3) Tujuan kolaborasi masuk akal
- 4) Masalah kolaborasi di definisikan
- 5) Saling mendidik satu sama lain
- 6) Solusi dibagi bersama
- 7) Implementasi solusi dibagi antar partisipan
- 8) Kedua belah pihak selalu mengetahui perkembangan situasi.

Selain itu mendorong kolaborasi antar aktor dalam implementasi kebijakan menjadi dimensi penting komponen utama dalam kolaborasi adalah (Sururi, 2020) :

1) *Collaborative culture*

Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Disini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-

orang yang akan berkolaborasi.

### *2) Strategik vision*

Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

### *3) Collaborative team process*

Sekumpulan proses kerja non biokrasi yang dikelola oleh tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

### *4) Collaborative structure*

Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.

## **2. Nilai Dasar Kolaborasi**

Ada sejumlah nilai dasar dalam melakukan kolaborasi. Nilai tersebut harus menjadi pegangan bagi kolaborator sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Ada 6 nilai dasar kolaborasi yaitu (Dominggus, 2020) :

1) Menghormati orang lain (*Respect for people*). Landasan utama dari

setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya.

- 2) Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu.
- 3) Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Ketika semua pegawai merasa memiliki tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik.
- 4) *Consensus* (*Consensus*). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang. Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan 100% harus *fully agreed* untuk mencapai win-win. Ini artinya mereka harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan.
- 5) Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Dalam paradigma hirarki biasanya orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan arena unit organisasinya. Faktanya setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.

- 6) Hubungan saling mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua orang menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak diantara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah yang menyulitkan dalam suatu organisasi.
- 7) Pengakuan dan pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerja yang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau bekerja, dan segera memberi pengakuan terhadap hasil kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok.

### **3. Bentuk – bentuk kolaborasi**

Berdasarkan beberapa referensi, terdapat tiga jenis bentuk kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup yaitu (Nisak & Wardhani, 2019) :

#### **1) Kolaborasi Primer**

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu grup. Grup ini berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup ini. Di dalam kelompok-kelompok terdapat individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di



dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya.

## 2) Kolaborasi Sekunder

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitive, maka kolaborasi sekunder bercirikan sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisasi dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan.

## 3) Kolaborasi Tersier

Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Kolaborasi tertier didasari oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya.

## 4. Prinsip Kolaborasi

Fitriana B. Makruffi (2018) menjelaskan bahwa ada sejumlah prinsip yang harus di penuhi dalam kolaborasi, diantaranya yaitu :

- 1) *Managing Ains*, merupakan alasan utama sutau kolaborasi terjadi, ada tiga level tujuan yang diusulkan yaitu: (1) suatu pernyataan eksplisit tentang tujuan yang ingin dicapai; (2) penjabatan kepentingan yang ingin dicapai tiap organisasi yang terlibat; (3) penjabaran tujuan individu dari setiap organisasi.
- 2) *Compromise*, kompromi dibutuhkan untuk mengatasi peerbedaan cara kerja, kultur, gaya kerja individu, dan nilai organisasi. Kompromi dilakukan dengan cara menciptakan jalan tengah yang mengakomodasikan pihak lain dan menghilangkan persepsi *stereotype* terhadap pihak lain.
- 3) *Communication*, bahasa meruupakan isu utama artinya masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan sinergi. Untuk itu tiap pihak di tuntutan untuk mau meleburkan diri untuk menjadi satu kesatuan.
- 4) *Democracy and Equality*, dalam kolaborasi ada tiga aspek demokrasi yang harus diperhatikan; pertama, siapa yang harus dilibatkan dalam kolaborasi. Kedua, proses kolaborasi yaitu kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang. Ketiga, akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk pertanggung jawaban atas organisasi dan konsituen.
- 5) *Power and Trust*, secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” komunitas lokal dan sekaligus menekan

perasaan “tinggi hati” lembaga pemerintah dan institusi gllbal. *Power and Trust* diilustrasikan sebuah organisasi pemerintah sebagai penyandang dana dan tenaga ahli dalam kolaborasi. Sedangkan kelompok kecil suatu komunitas menyumnangkan sutau keahlian penting dalam bentuk pengetahuan lokal. Secara ideologis juga digunakan sebagai alat kontrol terhadap perilaku. Berdasarkan prinsip kolaborasi di atas, diharapkan dapat mencapai tujuan kolaborasi yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Adanya tingkat partisipasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan sampai pada pengambilan keputusan dan kontrol terhadap pelaksanaan program
- 2) Kesetaraan kekuasaan dimana tidak ada dominasi oleh pihak tertentu dan setiap aktor yang terlibat tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati
- 3) Terdapat faktor-faktor yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi dan memiliki orientasi untuk mencapai tujuan bersama.

## **C. Ruang Lingkup Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

Desa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan local berskala Desa
- 3) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Asas-Asas Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

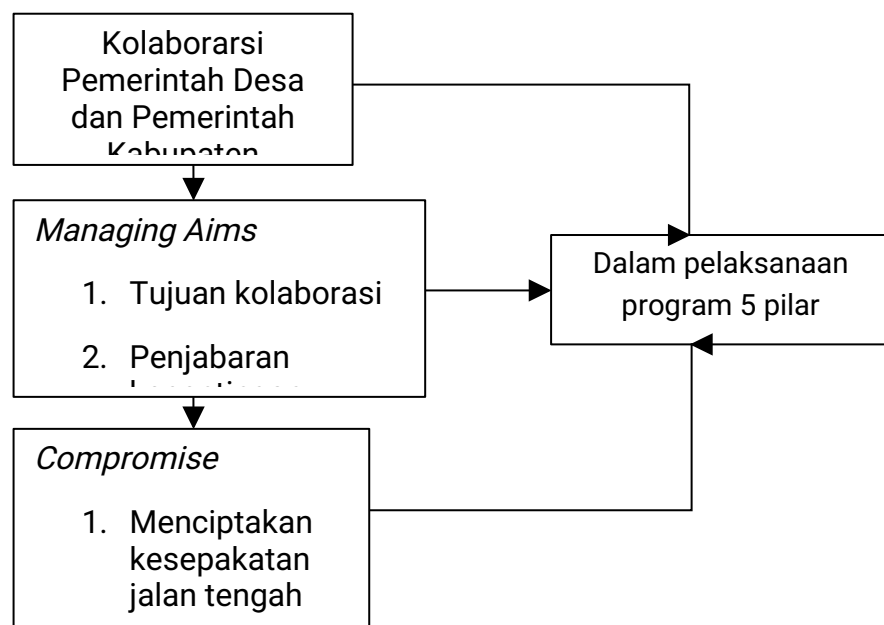
### **3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa**

Desa di pimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-berturut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (Sugiman, 2018).

#### **D. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji kolaborasi Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Karena dapat memberikan kesadaran pada masyarakat sekitar supaya hidup masyarakat lebih bersih dan sehat.

**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir Peneliti**



Sumber: Fitriani B. Makruffi, 2018

## E. Definisi konseptual

1. kolaborasi pemerintah sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik sendiri. Pengantutan ini ditandai dengan upaya bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antara entitas otonomi resmi, dari dua atau lebih sektor publik, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumber daya dari masing-masing. Definisi ini menekankan pada penyelesaian masalah *public* dengan melibatkan dua atau lebih sektor *public profit* dan *nonprofit*.
2. Enam hal dalam proses kolaborasi antar organisasi. Ke-enam hal tersebut adalah; (a) *managing aims*, (b) *compromise*, (c) *communication*, (d) *democracy and equality*, (e) *power and trust*, dan (f) *determinaton commitment and stamina*.

## F. Definisi Operasional

Definis operasional dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua variabel sebagai berikut:

1. Managing Aims
  - a. Tujuan kerjasama

- b. penjabaran kepentingan
- 2. Compromise
  - a. Menciptakan kesepakatan jalan tengah

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Sugiyono, 2019). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Kualitatif Deskriptif. Menurut (Sugiyono 2019), teknik



penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti ststus kelompok manusia, suatu

objek, kondisi, sistem pemikiran peristiwa masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan uyrain diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena analisis data yang terdiri dari data berupa tulisan dan kalimat serta mempertimbangkan pendapat orang lain yang menjaadi narasumber.

Dengan pendekatan ini penelit mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang direliti dalam hal Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Kabupaten Dalam Program 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masayrakat (STBM) di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

## **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi atau objek penelitian ini berada di Desa Muhajidin Kecamatan Brang Ene Kabupatem Sumbawa Barat.

Dalam penelitian ini waktu yang akan dibutuhkan olen peneliti diperkiraan sekitar 2 minggu (14 hari). Waktu yang di hitung sejak

dikeluarkan surat permohonan izin penelitian oleh pihak kampus. Ini dirasa cukup untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data-data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang di peroleh dari lokasi penelitian ataupun data yng bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitidari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa arsip pemerintahan Desa.

### **D. Tehnik Penentuan informan**

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling, dimana penelitian dilakukan dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Adapun subjek penelitian ini yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa/Sekretaris Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene
- b. Agen-agen STBM di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene
- c. Masyarakat penerima Bantuan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh data yang lengkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Definisi wawancara menurut Fadallah (2020) yang di kutip dari berbagai sumber adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak), sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah di tetapkan untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.
2. Definisi observasi menurut (Agung,2012) adalah suatu cara memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan. Berdasarkan pendapat tersebut maka observasi yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan yang disengaja dilakukan secara langsung.

3. Definisi dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dan mencatat data yang sudah ada.

Berdasarkan pendapat di atas maka yang dimaksud dengan metode dokumentasi ialah cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara mencatat keterangan-keterangan yang terdapat pada dokumen lainnya yang terkait dengan masalah yang akan ditulis.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori struktur klasifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah mencakup transkrip hasil wawancara. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

##### **a. Reduksi Data**

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan selanjutnya dari analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika pengumpulan data di kumpulkan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, B. Withford, 2010. *Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies*. International Public Management Journal. 13:4, 321-349
- Arfiah, dkk, 2018. *Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Kesehatan Masyarakat : ISSN 2541-4542
- Badan Pusat Statistik, 2021. <https://www.bps.go.id/> di akses tanggal 07 Agustus 2021
- Benu E. Dominggus, 2020. *Kolaborasi dan Koordinasi Penyusunan RBA Universitas Nusa Cendana Tahun 2018*. IJPA : Vol. 6 No. 1
- Departemen Kesehatan RI. 2008. *Kepuutusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta
- Fadallah, 2020. *Wawancara*. Jakarta Timur : UNJ Press
- Fitriana B. Makruffi, 2018. *Kolaborasi Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota*. JOM FISIP Vol. 5
- Irianti, dkk, 2021. *Pendekatan Kompetensi Mahasiswa Tata Busana*

*Universitas Negeri Malang dengan Kebutuhan Industri Melalui Sinergi Kolaborasi.* Proceeding : ISBN : 978-623-7833-86-4

Indriyani Yulis, dkk, 2016. *Kajian strategi promosi kesehatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kselurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.* Unnes Journal of Public Health : ISSN 2252-6781

Kasjono, dkk, 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Melaksanakan 5 Pilar STBM di Sorowayan Bantul.* Aksiologi : ISSN 2548-219X Vol. 1 No. 2

Kemenkes RI, 2012. *Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM.*

Marwanto, 2018. *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Bengkulu City.* JNPH : Vol. 7 No. 1

Moh, dkk, 2018. *Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Terhadap Kejadian Infeksi Kecacingan Pada Pekerja Penyadap Karet.* JNPH : Vol. 6 No. 2

Nisak A. Cahya & Wardhani A. Restu, 2019. *Sosial Kolaborasi Antar Divisi R&D Dengan Divisi Produksi Pada PT. XYZ.* CIASTECH : ISSN 2622-1284

Putra I. Angga, dkk, 2021. *Penyuluhan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) bagi masyarakat Desa Brangkal.* Jurnal Pengabdian Masyarakat : ISSN 2548-8813

Sugiyono, Dr. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: ALFABETA

Sutarjo, 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar di Kabupaten Pacitan.* Stie Widya Wiwaha : <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/335> di akses 07 Agustus 2021

Sururi, A. (2020). Collaborative Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten Religious Tourism Area. *Policy & Governance Review*, 4(2), 128.

Suryani A. Sri, 2020. *Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Saat Pandemi Covid 19.* Jurnal Masalah-Masalah Sosial : ISSN 2614-5863

STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), 2021.  
<http://stbm.kemkes.go.id/> di akses tanggal 07 Agustus 2021

Tuakong W. Mogi, dkk, 2020. *Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas Nangaror*. MKMI : ISSN 1412-4920

### **Regulasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 43.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### **Sumber Internet**

Samawarea.com diakses pada tanggal 05 November 2021  
<https://www.samawarea.com/2019/05/22/lagi-ksb-dapat-bantuan-8000-unit-septic-tank/>

InfoPublik diakses pada tanggal 06 November 2021  
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/561217/bupati-ksb-tuntas-stbm-5-pilar-bukti-dukung-ntb-sehat-dan-cerdas?show=>